



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1308, 2014

KKP. Rencana Kerja.

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/PERMEN-KP/2014
TENTANG
RENCANA KERJA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
 12. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
 13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54/P Tahun 2014;
 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.
3. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Renstra KKP, adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Renja KKP adalah dokumen perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015, yang selanjutnya disebut Renja KKP Tahun 2015, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional bidang kelautan dan perikanan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 2

- (1) Renja KKP Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan transisi yang menjadi jembatan antara Renstra KKP 2009-2014 dan Renstra KKP Tahun 2015-2019.
- (2) Renja KKP Tahun 2015 merupakan Rencana Kerja tahun pertama pelaksanaan Renstra KKP Tahun 2015-2019, serta memuat program dan kegiatan dan indikasi anggaran.
- (3) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.

- (4) Renja KKP Tahun 2015 disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah yang memuat kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja dan target sasaran kinerja berdasarkan pagu indikatif tahun 2015.
- (5) Renja KKP Tahun 2015 dijabarkan lebih rinci dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran-Kementerian Lembaga KKP berdasarkan UU APBN 2015.
- (6) Renja KKP Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi unit kerja eselon I dalam menyusun Renja Eselon I Tahun 2015

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015 difokuskan pada:
 - a. peningkatan produksi perikanan untuk pemantapan ketahanan pangan dan gizi;
 - b. peningkatan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - c. pendayagunaan potensi ekonomi sumber daya kelautan;
 - d. pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan; dan
 - f. peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan.
- (2) Indikator Kinerja Utama KKP Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan (%/tahun);
 - b. produksi perikanan (juta ton);
 - c. produksi garam rakyat (juta ton);
 - d. nilai tukar nelayan/pembudidaya ikan;
 - e. tingkat konsumsi ikan dalam negeri (kg/kapita/tahun);
 - f. nilai ekspor komoditas perikanan (USD miliar);
 - g. jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra (kasus);

- h. jumlah luas kawasan konservasi perairan yang dikelola (pulau);
 - i. jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang difasilitasi pengembangan ekonominya (pulau); dan
 - j. persentase ketepatan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%).
- (3) Program pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
- a. program pengembangan dan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap;
 - b. program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya;
 - c. program peningkatan daya saing usaha dan produk kelautan dan perikanan;
 - d. program pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. program pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - f. program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
 - g. program penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan;
 - h. program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
 - i. program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur KKP; dan
 - j. program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP.

Pasal 4

Renja KKP Tahun 2015 memuat Program, Kegiatan, Target, serta Anggaran Tahun 2015 berdasarkan pagu indikatif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2014
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39/PERMEN-KP/2014
 TENTANG
 RENCANA KERJA KEMENTERIAN
 KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015

RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 TAHUN 2015

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			336.476,7
		Indek kesenjangan kompetensi eselon II dan III (%)	50	
		<i>Service Level Agreement</i> (SLA) sistem informasi (%)	75	
		Persepsi pengguna terhadap akses informasi	4,25	
		Tingkat ketaatan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (%)	100	
		Tingkat kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI) (%)	100	
		Kecukupan pengungkapan Bagan Akun Standar (BAS) dalam Laporan Keuangan (LK)	cukup	
		Nilai perencanaan kinerja	27,5	
		Nilai pelaporan kinerja	12	
		Nilai pengukuran kinerja	15,5	
		Nilai evaluasi program	4,5	
		Nilai pencapaian kinerja	16	
		Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	80	
		Rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan KKP (%)	10	
		Jumlah perjanjian yang telah diimplementasikan (dokumen)	25	
	a. Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP			12.000,0
		Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan sesuai road map RB KKP (dokumen)	25	4.600,0
		Jumlah dokumen penataan organisasi sesuai road map RB KKP (dokumen)	4	550,0
		Jumlah dokumen penataan tata laksana sesuai road map RB KKP (dokumen)	3	2.250,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		Jumlah naskah kerjasama dan perjanjian internasional dan antar lembaga tepat waktu (dokumen)	25	2.850,0
		Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Biro Hukum yang tepat waktu (%)	100	1.750,0
	b. Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian KKP			14.000,0
		Persentase perencanaan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai sesuai kebutuhan (%)	100	4.000,0
		Persentase pelayanan pengangkatan kepangkatan, pemberhentian, pensiun, dan mutasi pegawai lainnya yang tepat waktu (%)	100	2.800,0
		Persentase pelayanan administrasi dan pengembangan jabatan fungsional sesuai kebutuhan (%)	100	3.000,0
		Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Biro Kepegawaian yang tepat waktu (%)	100	4.200,0
	c. Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP			19.000,0
		Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan pelaporan pelaksanaan anggaran lingkup KKP yang sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu (%)	100	2.795,0
		Persentase pengelolaan dokumen anggaran dan pengelolaan pendapatan negara bukan pajak sektor Kelautan dan Perikanan (KP) (%)	100	2.290,0
		Persentase laporan SPI dan Penyelesaian Kerugian Negara (%)	100	2.482,5
		Persentase laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) pengguna Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) pada koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W) (%)	100	3.500,0
		Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Biro keuangan yang tepat waktu (%)	100	7.932,5
	d. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi (Monev) Pembangunan KKP			37.500,0
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan jangka menengah pembangunan KP serta perencanaan lintas sektor yang tepat waktu (%)	100	6.500,0
		Persentase penyelesaian dokumen rencana kerja pembangunan KP tahunan lingkup KKP yang tepat waktu (%)	100	5.500,0
		Persentase penyelesaian dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA-K/L) lingkup KKP yang tepat waktu (%)	100	5.000,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		Persentase program dan kegiatan peningkatan AKIP yang akuntabel dan tepat waktu (%)	100	5.500,0
		Persentase pembinaan dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan monev pembangunan KP di provinsi (%)	100	12.500,0
		Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Biro Perencanaan yang tepat waktu (%)	100	2.500,0
	e. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP			182.476,7
		Jumlah paket pembangunan gedung Kantor KKP (paket)	1	45.188,3
		Jumlah paket pembinaan pengelolaan BMN lingkup KKP (paket)	397	28.489,9
		Persentase penyelesaian pengelolaan rumah tangga kantor pusat KKP (bulan)	100	83.909,7
		Persentase penyelesaian pelayanan ketatausahaan pimpinan (bulan)	100	23.560,0
		Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Biro Umum yang tepat waktu (%)	100	1.328,8
	f. Perumusan dan Pengembangan Kebijakan Kelautan			18.000,0
		Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan kelautan yang dapat menjadi masukan bagi Presiden RI dan Kementerian/Lembaga dalam penetapan kebijakan umum di bidang kelautan (rekomendasi)	11	3.000,0
		Jumlah rekomendasi rapat-rapat koordinasi kelompok kerja Dewan Kelautan Indonesia terkait permasalahan di bidang kelautan(rekomendasi)	10	1.500,0
		Jumlah kegiatan sosialisasi nilai-nilai kelautan dalam rangka mengubah mindset matra darat menjadi matra laut yang dapat membangkitkan wawasan dan budaya bahari (kegiatan)	4	7.950,0
		Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Dewan Kelautan (DEKIN) yang tepat waktu (%)	100	5.550,0
	g. Pengembangan dan Pembinaan Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga Bidang KP			20.000,0
		Jumlah dokumen kerja sama dan perjanjian bilateral bidang KP yang disepakati (dokumen)	4	1.600,0
		Jumlah dokumen kerja sama dan perjanjian multilateral bidang KP yang disepakati (dokumen)	3	1.200,0
		Jumlah dokumen kerja sama dan perjanjian antarlembaga bidang KP	5	2.000,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		yang disepakati (dokumen)		
		Jumlah kerja sama teknik bidang KP (dokumen)	2	1.400,0
		Jumlah dokumen pedoman Delegasi Republik Indonesia [DELRRI] (dokumen)	6	2.400,0
		Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga (Puskita) yang tepat waktu (%)	100	11.400,0
	h. Pengembangan Data Statistik dan Informasi KP			27.000,0
		Jumlah kelengkapan data dan statistik KKP terkini dan akuntabel (dokumen)	8	3.240,0
		Jumlah unit kerja yang terintegrasikan dalam sistem informasi manajemen KKP antara pusat dan provinsi (unit)	9	3.510,0
		Jumlah pemberitaan yang mendukung program KKP serta terbangunnya citra positif KKP (dokumen)	16	10.530,0
		Persentase pemenuhan dokumen penatausahaan Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin) yang tepat waktu (%)	100	9.720,0
	i. Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan			6.500,0
		Persentase pemenuhan dokumen persiapan operasional Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan [LPMUKP] (dokumen)	100	1.500,0
		Persentase penyaluran modal dana bergulir (%)	100	5.000,0
2.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap			1.512.750,76
		Jumlah produksi perikanan tangkap		
		- Volume produksi (ton)	6.227.220	
		- Nilai produksi (Rp Juta)	100.507.670	
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	104,0	
		Rata-rata pendapatan:		
		- Pendapatan RTP/bulan (Rp/RTP/bulan)	5.856.720	
		- Pendapatan Nelayan/bulan (Rp/nelayan/bulan)	1.950.640	
		Nilai investasi usaha perikanan tangkap (Rp Trilyun)	20	
		Jumlah penyaluran akses pemodalan perikanan tangkap (Rp Milyar)	850	
	a. Pengelolaan Sumber Daya Ikan			119.104,0
		Jumlah ekosistem Perairan Umum Daratan (PUD) yang direvitalisasi (lokasi)	3	12.625,4

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		Jumlah laut teritorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya (Wilayah Pengelolaan Perikanan/ WPP)	5	48.340,8
		Jumlah laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang dikelola sumber daya ikannya (WPP)	2	4.152,1
		Jumlah resolusi dan Conservation and Management Measures (CMM) Regional Fisheries Management Organisation (RFMO) yang diimplementasikan (buah)	3	2.000,4
		Jumlah ketersediaan data statistik perikanan tangkap (dokumen)	7	27.983,4
		Jumlah kapal perikanan yang menerapkan <i>logbook</i> penangkapan ikan (unit)	250	4.318,4
		Jumlah kapal perikanan yang dipantau oleh <i>observer</i> (unit)	100	13.684,8
		Jumlah perairan yang terevaluasi pengelolaan sumber daya ikannya (WPP)	3	5.998,7
	b. Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan			140.000,0
		Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan (unit)	700	13.050,0
		Jumlah kapal yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal (unit)	200	6.950,0
		Jumlah kapal > 30 GT yang terbangun (unit)	10	18.000,0
		Jumlah kapal 10-30 GT yang terbangun (unit)	37	37.000,0
		Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar dan ramah lingkungan (buah)	2929	6.640,0
		Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan (unit)	17000	11.560,0
		Jumlah awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan (orang)	700	9.300,0
		Jumlah kapal perikanan yang terpantau dan terevaluasi (unit)	800	5.500,0
		Jumlah dokumen teknis produktivitas perjenis alat penangkap ikan (dokumen)	1	2.000,0
		Jumlah standar dan sertifikasi dari inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan, dan kapal penangkap ikan yang dihasilkan (buah)	23	30.000,0
	c. Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan			848.389,2
		Jumlah pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat	22	422.230,3

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		(lokasi)		
		Jumlah pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan daerah prioritas (lokasi)	3	220.457,0
		Jumlah idetifikasi dan penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan (lokasi)	34	15.021,4
		Jumlah pengembangan pembangunan pelabuhan perikanan yang menerapkan prinsip <i>ecoport</i> (lokasi)	3	94.500,0
		Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional (lokasi)	22	22.876,0
		Jumlah pelabuhan perikanan yang dilakukan pengendalian pembangunan konstruksi (lokasi)	55	19.892,1
		Jumlah pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran (lokasi)	102	14.016,4
		Jumlah pelabuhan perikanan yang menerapkan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan [SHTI] (lokasi)	22	7.150,0
		Jumlah pelabuhan perikanan yang terpantau dan terevaluasi (lokasi)	90	18.796,0
		Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal memanfaatkan teknologi informasi untuk peningkatan integrasi dan konektivitas (lokasi)	22	13.450,0
	d. Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap			50.000,0
		Waktu pelayanan izin usaha penangkapan ikan [Surat Ijin Usaha Perikanan/ SIUP] (hari kerja/dokumen permohonan)	10	4.000,0
		Waktu pelayanan izin kapal penangkap/pengangkut ikan [Surat Ijin Kapal Penangkapan Ikan/ SIPI, Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan/ SIKPI] (hari kerja/dokumen permohonan)	7	3.000,0
		Jumlah alokasi izin yang diberikan terhadap peluang alokasi usaha penangkapan ikan yang tersedia (unit)	10.000	6.000,0
		Jumlah realisasi kapal terhadap alokasi dalam SIUP (unit)	9.600	4.500,0
		Jumlah tindak lanjut rekomendasi pelanggaran perijinan usaha perikanan tangkap (%)	100	3.000,0
		Jumlah penguatan sistem perizinan daerah (provinsi/kabupaten/kota)	11	20.000,0
		Jumlah WPP yang menerapkan penataan perizinan berbasis zonasi (WPP)	2	4.500,0
		Jumlah pelayanan usaha penangkapan ikan yang terevaluasi (dokumen)	1	5.000,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
	e. Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Nelayan		Pemberdayaan	110.000,0
		Jumlah Pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap (lokasi)	57	4.800,0
		Jumlah penumbuhan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUB)	2.000	44.000,0
		Jumlah pembinaan dan pengelolaan usaha (orang)	2.040	3.300,0
		Jumlah pengembangan diversifikasi usaha (orang)	1.020	9.400,0
		Jumlah peningkatan akses dan pembinaan modal usaha serta pengembangan investasi (lokasi)	34	8.800,0
		Jumlah pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbasis usaha penangkapan ikan (unit)	3	7.700,0
		Jumlah pembinaan dan perlindungan kenelayan (orang)	20.000	12.000,0
		Jumlah kelembagaan usaha yang terpantau dan terevaluasi (KUB)	5.000	11.000,0
		Jumlah nelayan yang terpantau dan terevaluasi (orang)	100.000	9.000,0
	f. Peningkatan Lainnya	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis		245.243,3
		Jumlah perencanaan, kerja sama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat (dokumen)	3	30.000,0
		Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kompeten yang dikelola sesuai kebutuhan (dokumen)	3	5.500,0
		Jumlah fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan (dokumen)	3	5.500,0
		Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap (dokumen)	3	204.243,3
3.	Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya			906.691,200
		Jumlah produksi perikanan budidaya		
		- Produksi perikanan (juta ton)	17,9	
		- Produksi ikan hias (milyar ekor)	1,7	
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	102	
	a. Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan			74.640,0
		Jumlah kawasan budidaya yang penyakit ikan pentingnya dapat dikendalikan melalui <i>surveillance</i> (kawasan)	3	13.000,0
		Jumlah data monitoring kualitas lingkungan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditas	35	8.800,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		strategis nasional (laporan)		
		Jumlah laboratorium Hama dan Penyakit Ikan (HPI) dan Residu yang memenuhi standar teknis (unit; kumulatif)	50	12.500,0
		Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)-3 sub bidang kesehatan ikan dan lingkungan yang disusun (judul; kumulatif)	45	440,0
		Jumlah obat ikan yang terjamin, mutu, keamanan dan khasiatnya (obat; kumulatif)	250	5.000,0
		Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang tingkat keberterimanya 96%	4.200	12.400,0
		Pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan (sampel)	25.235	6.000,0
		Jumlah hasil perekayasaan teknologi terapan bidang sistem kesehatan ikan dan lingkungan (paket teknologi)	16	8.000,0
		Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem kesehatan ikan dan lingkungan (lokasi)	17	8.500,0
	b. Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan			100.420,0
		Jumlah produksi induk unggul (juta induk)	10	33.000,0
		Jumlah unit pembenihan skala kecil siap disertifikasi (unit)	55	8.100,0
		Jumlah unit pembenihan skala besar yang siap disertifikasi (unit)	45	19.800,0
		Jumlah unit perbenihan bersertifikat (unit; kumulatif)	420	6.800,0
		Jumlah data informasi dan distribusi perbenihan (Laporan)	5	2.000,0
		Jumlah RSNI-3 sub bidang perbenihan yang disusun (judul; kumulatif)	34	220,0
		Jumlah hasil perekayasaan teknologi terapan bidang sistem perbenihan (paket teknologi)	27	13.500,0
		Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem perbenihan (lokasi)	34	17.000,0
	c. Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan			217.419,2
		Data pengembangan kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota; kumulatif)	170	9.800,0
		Jumlah kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air tawar (kawasan; kumulatif)	20	51.800,0
		Jumlah kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya air payau (kawasan; kumulatif)	20	15.000,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		Jumlah kawasan yang mempunyai data dukung dan pembangunan infrastruktur perikanan budidaya laut (kawasan; kumulatif)	15	30.600,0
		Jumlah kabupaten/kota minapolitan berbasis perikanan budidaya (kabupaten/kota; kumulatif)	85	28.400,0
		Jumlah RSNI-3 sub bidang prasarana dan Sarana budidaya yang disusun (judul; kumulatif)	22	495,0
		Hamparan pengelolaan saluran tambak partisipatif yang terlayani (m ²)	100000	69.324,2
		Jumlah hasil perekayasaan teknologi terapan bidang sistem prasarana (paket teknologi)	12	6.000,0
		Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem prasarana (lokasi)	12	6.000,0
	d. Pengelolaan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan			152.230,0
		Jumlah kelompok budidaya yang siap untuk disertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik [CBIB] (kelompok)	200	76.300,0
		Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB (unit; kumulatif)	8000	4.580,0
		Jumlah jenis pakan ikan yang terjamin mutunya (jenis; kumulatif)	800	3.000,0
		Jumlah RSNI-3 sub bidang produksi yang disusun (judul)	6	550,0
		Jumlah analisis dan publikasi data statistik perikanan budidaya (laporan)	6	39.800,0
		Jumlah hasil perekayasaan teknologi terapan bidang sistem produksi (paket teknologi)	14	14.000,0
		Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem produksi (lokasi)	14	14.000,0
	e. Pengelolaan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan			88.975,0
		Jumlah tenaga kerja baru perikanan budidaya (orang)	168.000	8.000,0
		Jumlah judul Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Judul; kumulatif)	2	300,0
		Jumlah kelompok usaha pembudidaya ikan yang diberdayakan di kawasan budidaya/ minapolitan/industrialisasi (kelompok)	630	48.000,0
		Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan melalui model pengembangan usaha budidaya (kelompok)	100	7.875,0
		Jumlah pembudidaya yang memperoleh akses permodalan melalui fasilitasi (orang; kumulatif)	2.700	9.800,0
		Jumlah investor baru di bidang perikanan budidaya yang difasilitasi	30	3.000,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		(orang; kumulatif)		
		Jumlah unit usaha budidaya yang memperoleh layanan perizinan (unit; kumulatif)	650	3.000,0
		Jumlah paket promosi usaha perikanan budidaya (paket)	35	3.000,0
		Jumlah tenaga teknis binaan oleh UPT Ditjen Perikanan Budidaya (orang)	2.300	6.000,0
	f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya			273.007,0
		Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat (dokumen)	3	11.600,0
		Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan (dokumen)	3	4.000,0
		Jumlah fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan perpustakaan (dokumen)	3	8.600,0
		Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen Perikanan Budidaya (dokumen)	3	248.807,0
4.	Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk KP			483.866,5
		Nilai ekspor hasil perikanan (USD Miliar)	5,86	
		Rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional (Kg/Kap)	40,90	
		Volume produk olahan hasil perikanan (Juta Ton)	5,60	
		Nilai produk nonpangan hasil perikanan (Rp. Triliun)	2,60	
		Nilai Investasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Rp. Triliun)	3,20	
	a. Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil KP			77.300,0
		Jumlah lokasi pengembangan dan pembinaan promosi dan kerja sama pemasaran hasil perikanan dalam negeri (provinsi)	34	11.250,0
		Jumlah lokasi fasilitasi pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) di pusat pengumpulan dan distribusi (Lokasi)	13	6.470,0
		Jumlah pengembangan kelembagaan pemasaran hasil perikanan (lembaga)	6	4.470,0
		Jumlah lokasi pengembangan sarana dan prasarana pemasaran dalam negeri (lokasi)	10	42.100,0
		Jumlah lokasi pengembangan informasi pasar dalam negeri (provinsi)	34	10.000,0
		Jumlah kebijakan bidang pemasaran	5	150,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		dalam negeri		
		Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Pemasaran Dalam Negeri	1	2.860,0
	b. Penguatan dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri Hasil KP			26.000,0
		Jumlah eksportir hasil perikanan berskala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibina dalam rangka peningkatan kemampuan dan daya saing (UMKM)	60	1.302,0
		Jumlah negara yang dilakukan penanganan hambatan ekspor hasil perikanan (negara)	3	2.601,0
		Jumlah promosi pemasaran internasional dalam rangka penguatan branding " <i>naturally diverse</i> " hasil perikanan Indonesia (jumlah promosi)	6	6.370,0
		Jumlah negara yang mengimplementasikan kerjasama pemasaran hasil perikanan (negara)	3	3.110,0
		Jumlah kesepakatan hasil perundingan internasional (dokumen kesepakatan)	4	1.409,0
		Jumlah utilitas pemanfaatan hasil perundingan (%)	50	1.779,0
		Jumlah negara yang terpetakan potensi dan daya saing pasar hasil perikanan (negara)	45	3.400,0
		Jumlah jenis produk unggulan ekspor hasil perikanan Indonesia yang terpetakan potensi dan daya saing pasarnya di negara tujuan utama (jenis produk)	4	947,0
		Nilai impor hasil perikanan sesuai standar mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan industri di dalam negeri (miliar USD)	< 1,17	2.335,0
		Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Pemasaran Luar Negeri	1	1.747,0
		Jumlah kebijakan bidang pemasaran luar negeri	5	1.000,0
	c. Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil KP			130.000,0
		Jumlah lokasi pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan (lokasi)	47	2.460,6
		Jumlah lokasi akselerasi peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan sentra pengolahan hasil perikanan (lokasi)	8	1.660,0
		Jumlah UMKM non-sentra yang dibina (UMKM)	102	5.430,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		Jumlah RSNI yang disusun	10	2.475,8
		Jumlah SNI produk perikanan yang disosialisasikan dan diterapkan	15	1.300,4
		Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) bagi Unit Pengolahan Ikan [UPI] (SKP)	500	6.467,8
		Jumlah UPI skala besar yang dikembangkan dan dibina dalam rangka memenuhi standar mutu hasil perikanan (UPI)	269	10.212,0
		Jumlah ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina (Ragam)	70	8.744,0
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina (Lokasi)	151	89.520,0
		Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Pengolahan Hasil	1	1.699,4
		Jumlah kebijakan bidang pengolahan hasil	5	30,0
	d. Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Nonpangan Hasil KP			53.000,0
		Jumlah UMKM produk non pangan hasil perikanan yang dibina dan dikembangkan (UMKM)	200	5.000,0
		Jumlah industri produk non pangan hasil perikanan yang dibina dan dikembangkan (industri)	30	4.500,0
		Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengembangan dan pembinaan produk non pangan hasil perikanan (lokasi)	80	19.050,0
		Jumlah provinsi pengembangan promosi dan jaringan pemasaran produk non pangan hasil perikanan (provinsi)	34	4.000,0
		Jumlah negara pengembangan promosi dan jaringan pemasaran produk non pangan hasil perikanan (negara)	5	7.500,0
		Jumlah rancangan standar nasional Indonesia yang disusun dalam pengembangan produk non pangan hasil perikanan (RSNI)	5	4.000,0
		Jumlah SNI yang diterapkan dalam pengembangan produk non pangan hasil perikanan (SNI)	15	4.950,0
		Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Pengembangan Produk Non Konsumsi	1	3.500,0
		Jumlah kebijakan bidang pengembangan produk nonpangan	5	500,0
	e. Peningkatan Investasi dan Perluasan Usaha Pasca Panen KP			41.500,0
		Jumlah calon wirausaha baru pengolahan dan pemasaran hasil	100	3.703,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		perikanan		
		Jumlah kebijakan bidang usaha dan investasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)	5	2.710,0
		Jumlah Penguatan promosi dan sistem informasi peluang usaha dan investasi (provinsi)	34	10.400,0
		Jumlah usaha pengolah dan pemasar yang tumbuh baru usahanya (PoK/Lahsar)	60	8.587,0
		Jumlah entitas usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang difasilitasi kemitraan, tumbuh dan berkembang (entitas usaha)	1.340	8.350,0
		Jumlah pembinaan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) sektor KP (Provinsi)	34	2.700,0
		Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Usaha dan Investasi	1	2.100,0
		Nilai permodalan usaha P2HP (Rp. Miliar)	320	2.950,0
	f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil KP			117.566,5
		Jumlah perencanaan, kerja sama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran (dokumen)	3	56.902,1
		Jumlah pengembangan SDM kompeten yang dikelola sesuai kebutuhan (dokumen)	3	4.750,0
		Jumlah fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan dan humas (dokumen)	3	6.500,0
		Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtangga di lingkungan Ditjen P2HP (dokumen)	3	49.414,4
	g. Pengembangan Uji Terap Produk dan Alat Pasca Panen dan Pemasaran Hasil KP			38.500,0
		Jumlah inovasi produk dan teknologi P2HP hasil pengujian penerapan hasil perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing (Ragam)	10	4.000,0
		Penyiapan bahan RSNI pengolahan dan pemasaran	5	500,0
		Penerapan penggunaan tanda SNI produk (sertifikat)	3	1.813,9
		Uji nutrisi dan mutu produk perikanan (data)	600	1.500,0
		Jumlah pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (UMKM)	14	3.700,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		Jumlah perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat (dokumen)	1	1.326,0
		Jumlah dokumen pengembangan SDM aparatur kompeten yang dikelola sesuai kebutuhan, ketatausahaan dan kerumahtangaan (dokumen)	1	19.880,0
		Jumlah pengembangan administrasi keuangan di lingkungan Balai Besar Pengolahan dan Pengembangan Hasil Perikanan [BBP2HP] (dokumen)	1	5.780,0
5.	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil			801.359,3
		Rata-rata pendapatan petambak garam rakyat per Kepala Keluarga (KK)/bulan (per musim) (Rp)	2.200.000	
		Jumlah produksi garam (jt Ton)	2,5	
		Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang difasilitasi pengembangan ekonominya (pulau)	15	
		Jumlah kawasan pesisir yang difasilitasi revitalisasinya untuk pusat pengembangan ekonomi (kawasan)	3	
		Jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha)	16,5	
		Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat efektifitas pengelolaannya (kawasan)	17	
		Persentase kawasan strategis yang memiliki dokumen perencanaan (%)	20	
		Persentase kualitas garam Kualitas Produksi (KP)-1 terhadap total keseluruhan (%)	40	
		Jumlah pengembangan kawasan ekonomi khusus berbasis gugus pulau kecil (gugus pulau)	3	
		Jumlah kawasan pesisir yang rusak pulih kembali (kawasan)	36	
		Jumlah produk dan jasa kelautan yang difasilitasi pengembangannya (produk)	3	
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis Jenis Ikan Yang Dilakukan Perlindungan, Pelestarian, dan/atau Pemanfaatan			280.000,3
		Jumlah penambahan luas kawasan konservasi (Ha)	500.000	10.000,0
		Jumlah kawasan konservasi yang dilakukan upaya perlindungan dan pelestariannya (kawasan)	17	247.000,3
		Jumlah kawasan konservasi yang difasilitasi upaya pemanfaatannya (kawasan)	10	9.500,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		Jumlah Jenis Ikan yang dilakukan perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatannya (jenis)	10	4.000,0
		Jumlah jejaring/kemitraan kawasan konservasi yang mendukung pengelolaan efektif (jejaring)	3	3.000,0
		Jumlah data dan informasi konservasi yang mendukung pengelolaan efektif (paket)	1	3.000,0
		Persentase penatausahaan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI) yang tepat waktu (%)	100	3.500,0
	b. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha			195.000,0
		Jumlah luas lahan yang difasilitasi (ha)	25.000	3.000,0
		Jumlah produksi garam KP1 (ton)	1.000.000	15.500,0
		Jumlah kelompok petambak garam yang diberdayakan (kelompok)	2.500	38.000,0
		Jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pesisir yang terfasilitasi permodalannya di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (unit)	10	8.000,0
		Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (kelompok)	793	9.000,0
		Jumlah sarana dan prasarana ekonomi yang dikembangkan (unit)	100	115.000,0
		Jumlah masyarakat adat, tradisional dan lokal yang direvitalisasi (komunitas)	8	3.000,0
		Persentase penatausahaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha yang tepat waktu (%)	100	3.500,0
	c. Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil			63.000,0
		Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) terluar berpenduduk terfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan ekonomi (pulau)	15	25.500,0
		Jumlah PPKT tidak berpenduduk yang dikelola (pulau)	7	4.000,0
		Jumlah gugus pulau yang dikembangkan sebagai sentra wisata bahari dan perikanan (gugus pulau)	3	10.000,0
		Jumlah pulau-pulau kecil yang terfasilitasi investasi dan pengembangan ekonominya (pulau)	5	7.000,0
		Jumlah pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya (pulau)	750	4.000,0
		Jumlah pulau-pulau kecil yang terfasilitasi pengelolaan lingkungannya dan mitigasi bencana/dampak perubahan iklim (pulau)	20	9.000,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		Persentase penatausahaan Direktorat Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil yang tepat waktu (%)	100	3.500,0
	d. Pendayagunaan Pesisir dan Lautan			55.000,0
		Jumlah produk dan jasa kelautan yang difasilitasi pengembangannya (produk)	3	12.500,0
		Jumlah ijin yang difasilitasi untuk pemanfaatan kawasan pesisir dan laut (ijin)	4	1.000,0
		Jumlah kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya (kawasan)	22	10.000,0
		Jumlah kawasan pesisir yang direhabilitasi (kawasan)	7	10.000,0
		Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengendalian pencemarannya (kawasan)	7	6.000,0
		Jumlah kawasan pesisir yang terfasilitasi pengembangan sarana dan prasarannya (kawasan)	3	12.000,0
		Persentase penatausahaan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Lautan yang tepat waktu (%)	100	3.500,0
	e. Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)			50.000,0
		Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, yang memiliki dokumen tata ruang WP3K (lokasi)	36	25.000,0
		Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di lintas wilayah Provinsi/Kab/Kota yang memiliki dokumen tata ruang WP3K (lokasi)	3	10.000,0
		Jumlah dokumen tata ruang WP3K di wilayah nasional dan lintas wilayah yang telah dievaluasi substansinya (dokumen)		
		Jumlah dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang diakselerasi legalitasnya (dokumen)	5	4.000,0
		Jumlah dokumen final RZWP3K kabupaten/kota dan provinsi yang telah dievaluasi substansinya (lokasi)	72	2.000,0
		Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi/kabupaten/kota yang memiliki dokumen tata ruang WP3K (lokasi)	50	5.500,0
		Persentase penatausahaan Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (TRLP3K) yang tepat waktu (%)	100	3.500,0
	f. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K)			158.359,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat (dokumen)	6	68.287,0
		Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan (dokumen)	1	3.000,0
		Jumlah fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan (dokumen)	3	10.000,0
		Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen KP3K (dokumen)	2	77.072,0
6.	Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			880.315,6
		Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan	75%	
		Persentase ketaatan pelaku usaha kelautan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	43%	
		Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	85,08%	
		Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari <i>illegal fishing</i> [11 WPP-NRI]	6,32%	
		Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu	80%	
		Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi (Impres 15 tahun 2011)	80%	
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas [POKMASWAS] yang membantu pengawasan pemanfaatan sumber daya KP (Kelompok)	1.128	
	a. Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas			259.000,0
		Jumlah hari operasi kapal pengawas	116 hari operasi	212.331,0
		Jumlah kapal pengawas yang siap beroperasi	27 unit	38.669,0
		Jumlah awak kapal pengawas yang memenuhi kualifikasi	108 orang	5.000,0
		Persentase penatausahaan Direktorat Kapal Pengawas yang tepat waktu	100%	3.000,0
	b. Penyelesaian Tindak Pidana KP			18.315,6
		Persentase Penyelesaian tindak pidana KP yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu	80%	1.246,0
		Persentase penyelesaian penanganan barang bukti dan awak kapal yang disidik secara akuntabel	80%	2.119,9

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		Jumlah forum koordinasi penanganan tindak pidana KP yang aktif berperan (forum)	39	3.384,6
		Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi (Impres 15 tahun 2011)	80%	500,0
		Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS] perikanan baru yang kompeten (orang)	30	2.000,0
		Data dan informasi penanganan pelanggaran yang akuntabel dan tepat waktu (dokumen)	13	6.663,4
		Persentase penatausahaan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang tepat waktu	100%	2.401,7
	c. Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan			17.000,0
		Jumlah kawasan konservasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan (lokasi/kawasan)	5	4.997,0
		Jumlah jenis ikan yang dilindungi, yang dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (jenis ikan)	6	1.600,0
		Jumlah WP3K yang dikelola (direncanakan dan dimanfaatkan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perijinan yang diberikan (lokasi)	30	2.053,0
		Persentase penurunan tingkat pencemaran akibat aktifitas perikanan [UPI] (%)	60	2.350,0
		Persentase survey Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau perijinan yang diberikan (%)	45	1.500,0
		Jumlah usaha garam yang sesuai ketentuan perijinan yang diberikan (usaha garam)	70	1.000,0
		Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan WP3K yang kompeten (orang)	100	2.500,0
		Persentase penatausahaan Direktorat Pengawasan Sumber Daya kelautan yang tepat waktu (%)	100	1.000,0
	d. Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan			27.000,0
		Persentase ketaatan unit usaha penangkapan ikan wilayah barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	95,35	11.856,0
		Persentase ketaatan unit usaha penangkapan ikan wilayah timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	89,61	4.900,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		Persentase ketaatan unit usaha pengolahan hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	80,00	1.020,0
		Persentase ketaatan unit usaha budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	75,37	1.330,0
		Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawasan [POKMASWAS] yang peran aktif dalam pengawasan sumber daya KP (POKMASWAS)	1.128	2.644,0
		Persentase Ketaatan importasi ikan yang sesuai dengan ketentuan	90,00	1.500,0
		Persentase Ketaatan Kemitraan UPI dengan Unit Usaha Penangkapan Ikan yang sesuai dengan ketentuan (%)	30,50	1.700,0
		Persentase penatausahaan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang tepat waktu (%)	100	2.050,0
	e. Operasional Pemantauan Pemanfaatan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan			410.000,0
		Jumlah pemenuhan sistem pemantauan sumber daya KP yang terintegrasi dan operasional sistem pemantauan sumber daya KP yang terintegrasi dan akuntabel (unit)	6	9.000,0
		Infrastruktur pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu [kapal pengawas, speedboat pengawas, kantor pengawas, dermaga, mess Anak Buah Kapal (ABK) {operator}, gudang barang bukti, rumah penampungan sementara ABK non justitia, pos pengawas] (unit)	10	388.462,6
		Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (%)	75,00	8.137,5
		Kawasan konservasi yang dapat dipantau (lokasi)	12	2.200,0
		Persentase penatausahaan Direktorat Pemantauan Sumber Daya KP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan yang tepat waktu (%)	100,00	2.199,9
	f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)			149.000,0
		Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat [dokumen]	3	15.342,1
		Jumlah Pengembangan SDM aparatur kompeten [orang]	150	750,0
		Jumlah pengembangan administrasi kepegawaian di lingkungan Ditjen	3	4.100,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		PSDKP [dokumen]		
		Jumlah fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas dan perpustakaan [dokumen]	3	5.390,0
		Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen PSDKP [dokumen]	3	123.417,9
7.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP			61.109,0
		Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dan internal dari total anggaran KKP	< 1%	
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja program-program strategis KP	82,00%	
		Nilai integritas KKP	8,00	
		Nilai inisiatif anti korupsi KKP	8,00	
		Level kapabilitas Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP (Internal Audit Capability Model /IACM)	Level 3	
		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KKP	A	
	a. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP			4.833,3
		Persentase perencanaan pengawasan internal berbasis risiko lingkup mitra Inspektorat I	100%	300,0
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat I	82,0%	2.532,3
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko, pelayanan publik, Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah (SAKIP), RB, Laporan Keuangan (LK), dan Pengadaan Barang dan Jasa (PEJ) lingkup mitra Inspektorat I yang dimanfaatkan	82,0%	1.108,0
		Nilai temuan material Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Satuan Kerja (Satker) mitra Inspektorat I yang telah diaudit oleh Itjen	< 1%	443,0
		Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan (persiapan dan pelaksanaan) yang memenuhi mutu hasil pengawasan lingkup mitra Inspektorat I	81%	75,0
		Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan pengawasan lingkup mitra Inspektorat I	81%	75,0
		Persentase penyerapan anggaran	>95%	100,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		Inspektorat I		
		Tingkat kepatuhan Inspektorat I terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) Itjen	85	100,0
		Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran, program kerja pengawasan, dan pengukuran kinerja Inspektorat I	95%	100,0
	b. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP			5.168,2
		Persentase kegiatan pengawasan internal berbasis risiko lingkup mitra Inspektorat II	100%	300,0
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat II	82,0%	2.679,2
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko, pelayanan publik, SAKIP, RB, LK, dan PBJ lingkup mitra Inspektorat II yang dimanfaatkan	82,0%	1.242,0
		Nilai temuan material BPK pada Satker mitra Inspektorat II yang telah diaudit oleh Itjen	< 1%	497,0
		Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan (persiapan dan pelaksanaan) yang memenuhi mutu hasil pengawasan lingkup mitra Inspektorat II	81%	75,0
		Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan pengawasan lingkup mitra Inspektorat II	81%	75,0
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat II	>95%	100,0
		Tingkat kepatuhan Inspektorat II terhadap SPI Itjen	85	100,0
		Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran, program kerja pengawasan, dan pengukuran kinerja Inspektorat II	95%	100,0
	c. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP			5.090,9
		Persentase kegiatan pengawasan internal berbasis risiko lingkup mitra Inspektorat III	100%	300,0
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat III	82,00%	2.628,9
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko, pelayanan publik, SAKIP, RB, LK, dan PBJ lingkup mitra Inspektorat III yang	82,00%	1.223,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		dimanfaatkan		
		Nilai temuan material BPK pada Satker Mitra Inspektorat III yang telah diaudit oleh Itjen	< 1%	489,0
		Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan (persiapan dan pelaksanaan) yang memenuhi mutu hasil pengawasan lingkup mitra Inspektorat III	81%	75,0
		Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan pengawasan lingkup mitra Inspektorat III	81%	75,0
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat III	>95%	100,0
		Tingkat kepatuhan Inspektorat III terhadap SPI Itjen	85	100,0
		Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran, program kerja pengawasan, dan pengukuran kinerja Inspektorat III	95%	100,0
	d. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP			4.599,6
		Persentase kegiatan pengawasan internal berbasis risiko lingkup mitra Inspektorat IV	100%	300,0
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup mitra Inspektorat IV	82,00%	2.112,6
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko, pelayanan publik, SAKIP, RB, LK, dan PBJ lingkup mitra Inspektorat IV yang dimanfaatkan	82,00%	1.343,0
		Nilai temuan material BPK pada Satker mitra Inspektorat IV yang telah diaudit oleh Itjen	< 1%	394,0
		Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan (persiapan dan pelaksanaan) yang memenuhi mutu hasil pengawasan lingkup mitra Inspektorat IV	81,00%	75,0
		Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan pengawasan lingkup mitra Inspektorat IV	81,00%	75,0
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat IV	>95%	100,0
		Tingkat kepatuhan Inspektorat IV terhadap SPI Itjen	85	100,0
		Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran, program kerja pengawasan, dan pengukuran kinerja	95%	100,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		Inspektorat IV		
	e. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada unit kerja Mitra Inspektorat V			4.500,3
		Persentase kegiatan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu berbasis risiko lingkup Inspektorat V	100%	300,0
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Itjen	82,00%	200,0
		Persentase jumlah rekomendasi pengawasan dengan tujuan tertentu yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP	82,00%	1.936,0
		Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal yang tidak dapat ditindak lanjuti (> 2 tahun)	50,00%	865,3
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko, pelayanan publik, SAKIP, RB, LK KKP, dan PBJ lingkup mitra Inspektorat V yang dimanfaatkan	85,00%	562,0
		Nilai temuan material BPK pada mitra Inspektorat V yang telah diaudit oleh Itjen	< 1%	187,0
		Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan (persiapan dan pelaksanaan) yang memenuhi mutu hasil pengawasan	81,00%	75,0
		Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan pengawasan lingkup Inspektorat V	81,00%	75,0
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat V	>95%	100,0
		Tingkat kepatuhan Inspektorat V terhadap SPI Itjen	85	100,0
		Tingkat kepatuhan terhadap penganggaran, program kerja pengawasan, dan pengukuran kinerja Inspektorat V	95%	100,0
	f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Kelautan dan Perikanan			36.916,7
		Nilai SAKIP Itjen	75,5	898,0
		Nilai penerapan RB Itjen	Level 4	360,0
		Persentase penyerapan anggaran Itjen KKP	>95%	25.967,3
		Tingkat ketaatan terhadap SAP Itjen	100%	289,0
		Tingkat kepatuhan terhadap SPI Itjen	85	395,0
		Kecukupan pengungkapan BAS dalam	100%	250,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		LK Itjen		
		Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional pada unit kerja Itjen yang ditindak lanjuti dibanding total rekomendasi	100%	790,0
		Persentase laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas/Pemeriksa (internal dan eksternal) lingkup KKP yang dianalisis dan dipantau	70%	263,0
		Indeks kesenjangan kompetensi pegawai lingkup Itjen	45%	658,0
		Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi (skala <i>likert</i> 1-5)	4,25	216,0
		Indeks persepsi pegawai KKP terhadap Itjen	4	216,0
		Jumlah peraturan perundang-undangan bidang pengawasan internal yang dianalisis	4	263,0
		Persentase LK Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang direviu melalui sinergi pengawasan	50%	888,0
		Pelaksanaan bimbingan teknis pengawasan bidang KP	10 lok	1.199,0
		Jumlah Sistem Informasi Pengawasan yang diimplementasikan	1	397,0
		Level kapabilitas auditor internal (<i>Internal Audit Capability Model/IACM</i>)	Level 3	3.867,4
8.	Program Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) KP			509.289,3
		Jumlah rekomendasi Litbang yang menjadi bahan kebijakan pembangunan pusat dan/atau daerah (paket)	7	
		Jumlah inovasi Litbang yang meningkatkan pendapatan /produksi yang diadopsi masyarakat (paket)	9	
		Jumlah pengguna hasil Litbang KP (kelompok)	76	
		IPTEK KP yang terekomendasi untuk masyarakat dan industri (buah)	18	
		Jumlah pengembangan ragam produk dan jasa kelautan hasil inovasi (buah)	3	
	a. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP			45.240,5
		Jumlah Rekomendasi iptek pengolahan produk dan bioteknologi KP (paket)	3	900,0
		Jumlah Paket penerapan Iptek pengolahan produk dan bioteknologi KP (paket)	6	2.400,0
		Jumlah Inovasi teknologi litbang pengolahan produk dan bioteknologi	1	300,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		KP yang diusulkan Hak Kekayaan Intelektual [HKI] (paket)		
		Jumlah Paket teknologi Litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP (paket)	2	1.050,0
		Jumlah komponen teknologi Litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP (paket)	11	2.893,0
		Jumlah data dan informasi Litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP (paket)	10	2.600,0
		Jumlah rancang bangun/model alat litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP (model)	4	1.480,0
		Jumlah inovasi produk kelautan hasil litbang pengolahan produk dan bioteknologi KP (buah)	1	350,0
		Karya tulis ilmiah bidang IPTEK pengolahan dan produk bioteknologi KP (KTI)	65	162,5
		Jumlah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Litbang IPTEK pengolahan produk dan bioteknologi KP (satker)	2	25.524,2
		Jumlah sarana dan prasarana Litbang IPTEK pengolahan produk dan bioteknologi KP yang terfasilitasi (paket)	3	7.580,8
	b. Penelitian Sosial Ekonomi KP			23.883,4
		Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan KP (paket)	6	2.100,0
		Jumlah model kelembagaan penyebaran IPTEK dan pemberdayaan masyarakat (model)	4	2.930,0
		Jumlah model kebijakan sosial ekonomi pembangunan sektor KP (model)	6	3.500,0
		Jumlah data dan informasi sosial ekonomi KP (paket)	15	220,0
		Karya tulis ilmiah bidang penelitian sosial ekonomi KP (KTI)	30	60,0
		Jumlah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Litbang IPTEK sosial ekonomi KP (satker)	1	13.983,8
		Jumlah Sarana dan prasarana Litbang sosial ekonomi KP yang terfasilitas (paket)	1	1.089,6
	c. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya			146.348,0
		Jumlah rekomendasi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam varietas baru/unggul, kualitas dan keamanan komoditas unggulan perikanan budidaya (paket)	7	3.414,1
		Jumlah model penerapan IPTEK	7	3.474,8

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		perikanan budidaya (paket)		
		Jumlah paket teknologi IPTEK perikanan budidaya (paket)	19	6.495,4
		Jumlah Inovasi Litbang perikanan budidaya yang diusulkan HKI (paket)	3	630,0
		Jumlah Komponen teknologi IPTEK perikanan budidaya (paket)	30	7.386,2
		Jumlah Data informasi IPTEK perikanan budidaya (paket)	31	4.359,9
		Jumlah Produk Biologi IPTEK perikanan budidaya (paket)	38	6.616,4
		Jumlah varietas unggul hasil Litbang perikanan budidaya yang diusulkan untuk dirilis (jenis)	3	477,0
		Karya tulis ilmiah bidang Litbang perikanan budidaya (KTI)	202	455,0
		Jumlah Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Litbang IPTEK perikanan budidaya (satker)	7	101.580,7
		Jumlah Sarana dan prasarana Litbang perikanan budidaya yang terfasilitasi (paket)	7	11.458,5
	d. Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan			90.604,6
		Jumlah Rekomendasi kebijakan pengelolaan perikanan tangkap dan konservasi Sumber Daya Ikan (SDI) berbasis IPTEK (paket)	7	1.910,2
		Jumlah paket penerapan IPTEK pengelolaan perikanan tangkap dan konservasi SDI (paket)	4	1.275,0
		Jumlah wilayah pengelolaan perikanan laut yang telah teridentifikasi karakteristik biologi perikanan, serta habitat sumberdaya, potensi produksi dan kapasitas penangkapan ikannya (WPP)	2	6.610,7
		Jumlah WPP Perairan Umum Daratan (PUD) yang telah teridentifikasi karakteristik biologi perikanan, serta habitat sumberdaya, potensi produksi dan kapasitas penangkapan ikannya (PUD)	8	2.657,8
		Jumlah kawasan konservasi yang telah teridentifikasi kerentanan, kelangkaan dan keterancamannya kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya (KKP/Kawasan Konservasi Perairan)	3	967,8
		Jumlah data dan informasi sumber daya, pemulihan habitat, konservasi dan teknologi penangkapan ikan	10	3.659,7
		Jumlah teknologi pengelolaan perikanan dan konservasi SDI (paket)	3	670,2

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		Karya tulis ilmiah bidang pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan (KTI/Karya Tulis Ilmiah)	90	225,0
		Jumlah dukungan teknis Litbang pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan (satker)	5	61.899,4
		Jumlah sarana prasarana Litbang pengelolaan perikanan dan konservasi sumber daya ikan yang terfasilitasi (paket)	5	10.728,8
	c. Pengkajian dan Perekayasaan Teknologi KP			103.889,2
		Jumlah rekomendasi teknologi KP (paket)	4	1.050,0
		Jumlah paket penerapan pengkajian dan perekayasaan teknologi KP (paket)	3	1.092,6
		Jumlah inovasi teknologi KP (paket)	5	2.650,0
		Jumlah data dan /atau informasi fenomena alam laut dan perubahan iklim (paket)	2	2.090,0
		Jumlah data dan informasi teknologi KP, hasil observasi laut dan pengawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil (Paket)	4	900,0
		Jumlah inovasi produk dan jasa kelautan hasil pengkajian dan perekayasaan teknologi KP (buah)	1	1.272,2
		Karya tulis ilmiah bidang pengkajian dan perekayasaan teknologi KP (KTI)	47	117,5
		Jumlah prasarana/infrastruktur teknologi KP (paket)	1	57.334,5
		Jumlah dukungan teknis pengkajian dan perekayasaan teknologi KP (satker)	3	24.437,6
		Jumlah sarana prasarana pengkajian dan perekayasaan teknologi KP yang terfasilitasi (paket)	3	12.944,8
	f. Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika, dan Sumber Daya Laut dan Pesisir			32.554,0
		Jumlah rekomendasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir secara berkelanjutan (paket)	8	3.425,4
		Jumlah Paket penerapan Iptek kewilayahan, dinamika dan sumberdaya pesisir dan laut (paket)	3	1.750,0
		Jumlah kawasan pesisir yang terpetakan sumber dayanya (SDLP)	5	1.248,2
		Jumlah WPP yang terpetakan karakteristik dan dinamika laut (WPP)	5	2.795,0
		Jumlah dokumen data dan/atau informasi sumber daya dan kerentanan pesisir dan laut (paket)	5	1.200,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		Jumlah inovasi produk dan jasa kelautan hasil litbang sumber daya laut dan pesisir (buah)	1	500,0
		Karya tulis ilmiah bidang IPTEK kewilayahan, dinamika, dan sumber daya laut dan pesisir (KTI)	45	90,0
		Jumlah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Litbang IPTEK Kewilayahan, dinamika dan sumberdaya pesisir dan laut (satker)	2	16.616,9
		Jumlah sarana dan prasarana Litbang IPTEK kewilayahan, dinamika, dan sumber daya laut dan pesisir yang terfasilitasi (paket)	2	4.928,5
	g. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan KP			66.769,6
		Jumlah dokumen perencanaan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran (buah)	3	5.680,2
		Jumlah dokumen pengelolaan administrasi dan pengembangan SDM serta fasilitas produk hukum (buah)	3	5.701,6
		Jumlah pengembangan kerjasama, dukungan penyebaran dan penerapan hasil litbang, humas dan perpustakaan (buah)	3	8.562,2
		Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan ketatausahaan dan administrasi rumah tangga dan BMN (buah)	3	19.989,6
		Jumlah Dokumen fasilitasi rekomendasi dan analisis Kebijakan (buah)	6	1.188,7
		Jumlah dokumen fasilitasi penilaian teknologi yang direkomendasikan (buah)	2	1.000,0
		Sarana dan prasarana dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Balitbang KP yang terfasilitasi (paket)	3	24.647,3
4.	Program Pengembangan SDM KP			536.334,4
		Jumlah lulusan yang terserap di dunia kerja bidang KP (orang)	1.615 (95 % dari lulusan)	
		Jumlah anak keluarga nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan serta petani garam yang diterima sebagai peserta didik (orang)	680 (40% dari penerimaan peserta didik baru)	
		Jumlah mitra yang menjadikan satuan pendidikan KKP sebagai pusat rujukan (mitra/lembaga/instansi)	15	
		Rasio jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang dapat menerapkan hasil pelatihannya	90% (13.500)	

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		terhadap jumlah lulusan pelatihan		
		Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya	4000	
		Penumbuhan Kelompok pelaku utama/usaha kelautan dan perikanan	1270	
	a. Pelatihan KP			117.000,0
		Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang kompeten (orang)	15.000	35.450,9
		Jumlah aparatur lulusan pelatihan yang kompeten (orang)	2.200	12.754,5
		Jumlah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar	406	30.167,6
		Persentase dokumen penatausahaan kegiatan pelatihan KP	100%	38.627,0
	b. Pendidikan KP			281.000,0
		Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang)	6.250	124.612,0
		Jumlah SDM KKP yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan formal (orang)	110	7.970,0
		Persentase dokumen penatausahaan kegiatan pendidikan KP	100%	148.418,0
	c. Penyuluhan KP			81.334,4
		Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok)	51.270	32.416,0
		Jumlah penyuluh perikanan yang melakukan penyuluhan KP (orang)	12.000	21.667,0
		Persentase dokumen penatausahaan kegiatan penyuluhan KP	100%	27.251,4
	d. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPSDMKP			57.000,0
		Jumlah perencanaan, program dan anggaran, data informasi dan kehumasan serta kerjasama berdasarkan data yang valid dan akuntabel (dokumen)	3	10.048,0
		Jumlah SDM aparatur kompeten yang dikelola sesuai kebutuhan, fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan dan organisasi di lingkungan BPSDMKP (dokumen)	3	4.754,0
		Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan BPSDMKP (dokumen)	3	6.205,0
		Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan serta dokumentasi dan	3	4.742,0

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		perpustakaan di lingkungan BPSDMKP (dokumen)		
		Jumlah kesesuaian tertib administrasi, dan layanan perkantoran dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan BPSDMKP (dokumen)	3	31.251,0
10.	Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM)			340.479,4
		Penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra (kasus)	≤ 10	
		Jumlah unit pelaksana teknis yang kompeten memberikan layanan ekspor (unit)	35	
		Persentase jumlah jenis Penyakit Ikan Karantina yang dicegah penyebarannya antar zona melalui tindakan karantina di <i>exit</i> dan <i>entry point</i> (%)	100,00	
	a. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM			246.356,3
		Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat (dokumen)	6	11.322,0
		Jumlah pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan dan fasilitasi produk hukum ketatalaksanaan	5	7.904,0
		Jumlah pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan BKIPM (dokumen)	5	219.136,3
		Jumlah ketatalaksanaan informasi dan kehumasan (dokumen)	6	7.994,0
	b. Pengembangan dan Pembinaan Perkarantina Ikan			47.670,0
		Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI (%)	100,00	7.953,2
		Jumlah kebijakan publik bidang perkarantina ikan, yang diselesaikan (dokumen)	3	354,3
		Jumlah draft peraturan perundangan undangan bidang perkarantina ikan yang diselesaikan (dokumen)	2	236,2
		Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) (unit)	10	2.244,2
		Jumlah negara yang harmonis dalam penerapan sistem perkarantina ikan (negara)	2	314,9
		Jumlah sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi standar (sertifikat)	31.500	6.067,1
		Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina (lokasi)	92	8.739,3

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		Jumlah sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi standar (sertifikat)	137.000	8.383,5
		Jumlah instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang layak untuk ditetapkan (unit)	220	2.351,1
		Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang diselesaikan (%)	100	3.373,7
		Persentase penatausahaan Pusat Karantina Ikan yang tepat waktu (%)	100	7.652,5
	c. Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan			26.682,7
		Lokasi perairan laut yang dipetakan dari cemaran <i>marine biotoxin</i> dan logam berat (lokasi)	3	776,0
		Jumlah kebijakan publik bidang mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (kebijakan)	1	157,5
		Jumlah draf peraturan perundangan undangan bidang mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan (dokumen)	1	242,5
		Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor (unit)	550	5.426,7
		Lokasi yang termonitor kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya (lokasi)	25	2.886,0
		Jumlah negara mitra yang harmonis dengan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan (MRA/ MoU)	34	2.034,0
		Jumlah sertifikasi mutu produk ekspor	80.000	6.381,0
		Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di UPI	1.130	1.163,5
		Penanganan kasus ekspor hasil perikanan yang diselesaikan (%)	90	1.192,5
		Persentase penatausahaan Pusat Sertifikasi Mutu yang tepat waktu (%)	100	6.423,0
	d. Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan			19.770,4
		Jumlah pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem <i>traceability</i> (UPI)	20	1.174,5
		Jumlah UPT yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 (unit)	12	1.085,3
		Jumlah UPT yang menerapkan sistem manajemen inspeksi ISO 17020 (unit)	10	1.715,1
		Jumlah laboratorium yang konsisten dalam penerapan ISO 17025 (unit)	15	1.855,3
		Jumlah unit kerja lingkup otoritas kompeten yang menerapkan sistem pengendalian mutu (unit kerja)	20	673,7

No.	Program/ Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran (Rp.juta)
		Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang mengikuti uji kompetensi (orang)	180	4.757,2
		Peningkatan jumlah RSNi metode pengujian	3	572,4
		Jumlah hasil uji banding dan rujukan yang divalidasi	1000	1.000,0
		Jumlah jenis parameter uji yang di profisiensi	4	2.500,0
		Persentase penatausahaan Pusat Manajemen Mutu yang tepat waktu	100%	4.436,9
		Jumlah		6.368.672,15

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO